



**DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL DAN POLA ADAPTASI MASYARAKAT
SUKAMAKMUR PASCA PERALIHAN LAHAN PERTANIAN MENJADI
PENUNJANG KEPARIWISATAAN**

Sry sulastr br Ginting, Bengkel Ginting, Henry Sitorus, Badaruddin, Lina Sudarwati
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email : sryginting123@gmail.com, bengkel@usu.ac.id, sitorhen66@gmail.com,
badaruddin@usu.ac.id, linasudarwati7@gmail.com

Abstrak

Pembangunan infrastruktur dan berbagai sarana pendukung kepariwisataan telah membuat beralihnya peruntukan lahan pertanian yang ada di Desa Sukamakmur. Padahal mayoritas penduduk desa ini sebelumnya merupakan petani, baik sebagai pemilik lahan, penggarap, maupun pemilik sekaligus penggarap. Pada saat ini, dari 525 ha keseluruhan luas desa Sukamakmur, hanya tersisa 10 ha yang menjadi lahan pertanian. Oleh karena itu menarik untuk melihat dinamika perubahan sosial para petani sekaligus bagaimana pola adaptasi yang mereka lakukan pasca peralihan tersebut. Tujuan penelitian ini melihat peningkatan jumlah pendatang dan kepadatan jumlah penduduk Desa Sukamakmur yang komposisinya saat ini terdiri dari beragam etnis, maka perubahan selanjutnya yang bisa ditemukan adalah tentang heterogenitas atau kemajemukan sosial. Melalui metode observasi langsung dan wawancara mendalam kepada para informan, maka terlihat telah terjadi perubahan sosial pada masyarakat Sukamakmur. Perubahan sosial tersebut khususnya tentang prespektif mereka menyoal tanah leluhur yang kemudian mempengaruhi norma-norma sosial serta interaksi antar penduduk. Kemudian terlihat pula pola adaptasi yang mereka lakukan ketika wajah desa mereka sudah beralih, dari desa pertanian menjadi desa pariwisata. Dampak positif dari perkembangan yang pesat di Sukamakmur berjalan beriringan dengan dampak negatif yang ada serta kemudian menimbulkan beberapa gejolak sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, pendidikan dan pembinaan menyangkut keterampilan menjadi hal yang selanjutnya dibutuhkan sehingga laju penjualan lahan berikut menghilangnya pertanian, dapat dibendung. Sekaligus mampu mendidik masyarakat untuk mengkonversi hasil penjualan lahan ke dalam bidang yang lebih produktif

Kata kunci: Perubahan Sosial; Pola Adaptasi; Masyarakat Pedesaan; Pemberdayaan Sosial

Abstract

The development of infrastructure and various tourism supporting facilities has made the allocation of agricultural land in Sukamakmur Village shift. Even though the majority of the residents of this village were previously farmers, both as land owners, cultivators, and owners as well as cultivators. At present, of the total 525 ha of Sukamakmur village, only 10 ha remains as agricultural land. Therefore, it is interesting to see the dynamics of social change among farmers as well as how they adapt patterns after the transition. The purpose of this study is to see the increase in the number of immigrants and the density of the population of Sukamakmur Village whose composition currently consists of diverse ethnicities, so the next change that can be found is about heterogeneity or social plurality. Through direct observation methods and in-depth interviews with informants, it can be seen that there has been a social change in the Sukamakmur community. These social changes, especially about their perspective on ancestral lands, then affect social norms and interactions between residents. Then it can also be seen the pattern of adaptation they did when the face of their village has switched, from an agricultural village to a tourism village. The positive impact of rapid development in Sukamakmur goes hand in hand with the existing negative impacts and then causes some social turmoil in the community. Furthermore, education and coaching regarding skills are needed so that the pace of land sales and the disappearance of agriculture, can be contained. As well as being able to educate the community to convert the proceeds of land sales into more productive fields.

Keywords: Social Change, Adaptation Pattern, Rural Community, Empwerment

PENDAHULUAN

Perubahan adalah sebuah keniscayaan, namun tidak semua perubahan itu dapat

dikategorikan sebagai perubahan sosial. Perubahan sosial memiliki dimensi sosial pembentuk masyarakat, seperti perubahan pada unsur lain yang dapat menciptakan disorganisasi, serta terjadi pada aspek materil dan immateril (Utomo & Sutopo, 2020). Tidak ada masyarakat yang berhenti untuk berubah. Inilah yang menyebabkan berbagai studi atau kajian mengenai masalah perubahan sosial selalu berkembang dan diperbaharui (Kusumadinata, 2015). Oleh karena itu, hampir semua kajian dalam studi Sosiologi selalu terkait dengan masalah perubahan sosial. Kemudian perubahan sosial ini sudah pasti meliputi masalah proses, bentuk-bentuk perubahan sosial dan yang paling penting adalah dampak perubahan sosial itu sendiri terhadap masyarakat (Martono, 2012).

Demikian halnya yang terjadi di Desa Sukamakmur, yang dahulunya merupakan sebuah desa pertanian yang terletak di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara. Saat ini Desa Sukamakmur telah dan sedang mengalami perubahan sebagai akibat tekanan perkembangan pembangunan, urbanisasi serta infrastruktur pariwisata dan kegunaan lainnya. Indikasi terjadinya perubahan dapat diamati dari kepadatan penduduk dan berbagai bangunan infrastruktur pariwisata, perdagangan dan transportasi—yang dapatlah dikatakan- saat ini semakin ramai dan semakin padat. Ketersediaan fasilitas dan sarana publik perkotaan atau daerah yang sedang berkembang, kini telah hadir, di antaranya properti, perumahan, minimarket dan restoran cepat saji (*fast food*). Sedangkan infrastruktur pariwisata yang tersedia diantaranya hotel, resort, amusement (sarana hiburan) dan rekreasi, villa dan layanan telekomunikasi digital (Utama, 2017).

Letak Desa Sukamakmur yang strategis yang berada di perlintasan jalan Provinsi yang menghubungkan Kota Medan dengan Kota Berastagi, saat ini telah berdiri dan beroperasi pusat taman permainan yaitu Hill Park and Waterboom, Retreat Center GBKP, Pusat Rehabilitasi Penyandang Narkoba GAN serta Hotel dan *resort* The Hill. Keramaian kendaraan bermotor yang melintasi desa tersebut menuju Berastagi, Sidikalang dan Provinsi Aceh pada siang maupun malam hari, terutama pada saat *weekend* dan hari libur, menjadikan Desa Sukamakmur sebagai wilayah penyangga karena telah tersedia SPBU dan warung-warung makan dan minum untuk persinggahan.

Tabel 1.

Gambaran Sarana Prasarana Wisata dan Fasilitas Kegunaan Lainnya berdasarkan Luas Lahannya, yang berada di Desa Suka Makmur Kecamatan Sibolangit Tahun 2022.

No.	Nama Perusahaan	Profil	Luas Lahan
1.	Green Hill (Hill Park)	Villa & Pusat taman bermain	180 Hektar
2.	Taman Jubelium Gereja Batak Karo Protestan (GBKP)	Wisata rohani yang dilengkapi dengan penginapan	50 Hektar
3.	The Hill	Resort & Hotel	10 Hektar
4.	Pusat Rehabilitasi Narkoba GAN	Pengguna Rehabilitasi Pengguna Narkoba	3 Hektar
5.	The Green Land	Villa	0,5 Hektar

Sumber: Data Desa Suka Makmur, 2022

Eksisnya berbagai infrastruktur wisata di Desa Sukamakmur yang telah terjadi dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, memiliki dampak yang berbeda bagi masyarakat lokal. Sebagian masyarakat mampu *survive* di tengah perkembangan yang terjadi, dengan melakukan penyesuaian mata pencaharian dengan membuka warung rumah makan yang saat ini telah

menjamur. Namun sebagian lainnya mengalami guncangan dan terseok-seok, terutama mereka yang memiliki modal sosial terbatas. Singkatnya, sebagian masyarakat lokal yang adaptif mampu memanfaatkan perkembangan yang terjadi, dengan berbagai peralihan moda kegiatan ekonomi dari sektor pertanian ke sektor perdagangan dan penyangga usaha pariwisata. Sedangkan bagi masyarakat lokal lainnya tersisih karena gagal mengikuti trend perkembangan wilayah desa, dimana yang tidak mampu bertahan akan melakukan migrasi ke luar desa.

Fakta sosial diatas dapatlah ditelaah mengikuti pemikiran perubahan sosial dalam ranah teoritis historis, baik dari perspektif klasik, modern, postmodern atau juga postkolonial, yang selalu memperlihatkan daya rusak terhadap mereka yang tidak sigap menghadapi perubahan sosial itu sendiri (Riyanto, 2019). Pola adaptasi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat lokal dengan membuka unit usaha dan perubahan mata pencarian yang mendukung usaha wisata, merupakan salah satu bentuk kreatifitas sosial. Namun bagi sebagian kelompok masyarakat yang tidak sigap untuk beradaptasi maka mereka akan menjadi kelompok rentan, karena ketidakmampuan mereka untuk menikmati akses inklusi sosial. Kelompok ini merupakan kelompok dalam masyarakat yang mengalami eksklusi sosial, yaitu proses yang membuat individu atau kelompok tertentu tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial baik secara menyeluruh maupun sebagian (Rawal, 2008).

Perubahan kegunaan lahan di desa ini, dari lahan pertanian menjadi sarana prasarana wisata, perumahan, perdagangan dan fasilitas pendukung lainnya diawali dengan peralihan kepemilikan tanah. Berdasarkan data Podes Inti Desa Suka Makmur tahun 2022, ternyata dari 525 ha luas tanah, sebanyak lebih dari 270 ha telah beralih kepemilikannya ke perusahaan-perusahaan penunjang pariwisata tersebut. Setelah dikurangi dengan luas pemukiman yang kian bertambah karena masuknya arus pendatang, maka sisa lahan pertanian tidak lebih dari 10 ha.

Desa Sukamakmur diserbu oleh para pendatang dengan mayoritas pendatang ini hadir sebagai pekerja setelah masuknya perusahaan-perusahaan industri pariwisata tersebut. Sebagian besar adalah karyawan yang berdiam secara menetap sehingga memerlukan lahan sebagai tempat tinggal. Sebagian lagi ada yang berprofesi sebagai buruh harian yang ulang alik, serta ada yang menetap sebagai pekerja upahan atas adanya usaha pengrajin keranjang bambu sebagai pendukung usaha perdagangan sayur mayur dari Dataran Tinggi Tanah Karo, hal ini didukung oleh ketersediaan bambu yang melimpah di sekitar desa Sukamakmur sebagai bahan baku. Mayoritas pendatang yang bekerja di perusahaan indutri pariwisata beretnis Karo, Batak, dan Jawa. Sedangkan pengrajin keranjang bambu -yang hampir keseluruhan berstatus buruh harian atau *borongan*- beretnis Nias.

Berdasarkan fakta perubahan-perubahan diatas, peneliti menjadi tertarik untuk mengurai secara mendalam dinamika perubahan sosial masyarakat dilihat dari dampak perubahan infrastruktur Desa Sukamakmur serta pola adaptasi masyarakat lokal khususnya dari segi mata pencaharian (Hatu, 2018). Temuan awal peneliti, terdapat fenomena menarik dimana masyarakat Desa Sukamakmur yang berprofesi sebagai petani semakin hari mengalami penyusutan jumlah.

Selain itu, tujuan penelitian ini melihat peningkatan jumlah pendatang dan kepadatan jumlah penduduk Desa Sukamakmur yang komposisinya saat ini terdiri dari beragam etnis, maka perubahan selanjutnya yang bisa ditemukan adalah tentang heterogenitas atau kemajemukan sosial. Desa Sukamakmur yang kini dihuni dari beragam suku, dimana Suku Karo tidak lagi menjadi satu-satunya suku yang mendiami desa ini, secara tidak langsung juga menarik untuk melihat bagaimana keterbukaan masyarakat Desa Sukamakmur menerima pendatang dan tidak memandang suku dan agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan observasi langsung ke lokasi yang menjadi subyek utama penelitian. Dalam usaha mengembangkan teori berdasarkan data lapangan, metode observasi partisipasi juga dilakukan. Studi lapangan ini terutama digunakan untuk mengidentifikasi situasi dan kondisi obyektif dinamika masyarakat (Sari et al., 2022).

Disamping itu penelitian ini juga merupakan studi dokumentasi sehingga membimbing penelitian ini pada pengumpulan data sekunder. Dengan kata lain, studi ini merupakan perpaduan antara kerja lapangan (*field work*) dan kerja pustaka dengan penggalian data skunder melalui pelacakan dari dokumen otentik. Kerja lapangan dimaksudkan untuk dapat mengeksplorasi dan memperoleh data primer (*first hand informations*) dan kerja pustaka dimaksudkan untuk mengkaji data *sekunder* (*second hand informations*). Penggunaan perpaduan antara data primer dan sekunder diharapkan akan dapat menghasilkan akurasi analisis dan kedalaman interpretasi atas masalah kerentanan dan pola adaptasi tersebut. Penelitian kualitatif deskriptif observatif dipilih karena penelitian dengan metode ini dapat menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual, nyata pada saat ini, karena penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Rukajat et al., 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi data dan latar belakang informan yang mewakili masyarakat Sukamakmur untuk 'hadir' melalui hasil penelitian ini.

1. Informan Utama

a. Ranogi Bangun. Usia : 42 Tahun.

Ranogi adalah cucu dari Rasman Bangun yang merupakan penduduk asli Sukamakmur dan memiliki tanah terluas, yang kini sudah beralih kepemilikan. Saat ini Ranogi Bangun sudah menikah dan menjadi karyawan tetap di Komplek Taman Jubelium 100 Tahun GBKP sebagai satpam. Selain itu Ranogi, yang merupakan lulusan perguruan tinggi swasta di Kota Medan, juga beternak babi dan memiliki lahan pertanian dengan luas kurang dari 1000 m².

b. Samuil Gurusinga. Usia 67 Tahun.

Samuil Gurusinga adalah bagian dari keluarga besar Gurusinga yang memiliki lahan terluas, yang kini sudah beralih kepemilikan kepada Green Hill. Saat ini Samuil Gurusinga bersama anaknya, yang tidak lagi memiliki lahan pertanian, memiliki usaha jual beli tepas dan paski hutan.

2. Informan dari Pendatang Yang Sudah Menetap Di Sukamakmur

a. Nelson Tarigan. Usia 62 Tahun.

Nelson dengan beberapa saudara telah menetap di Sukamakmur lebih dari 40 tahun lamanya. Kini mengisi masa pension dengan bertani di desa tetangga dan beternak puluhan ekor ayam. Nelson Tarigan yang sudah menganggap Sukamakmur sebagai tanah kelahirannya, juga seringkali terlibat dalam acara-acara adat. Beliau sudah dianggap salah satu tokoh yang terpendang di Sukamakmur.

b. Ridho Tarigan. Usia 56 Tahun.

Bersama dengan abangnya Nelson Tarigan, Ridho merupakan penghuni panti

asuhan milik GBKP. Saat ini, sama seperti abangnya, Ridho bersama keluarga kecilnya juga bermukim di Sukamakmur. Memiliki pekerjaan tetap di YAPIDI dan sedang giat menjalankan program tanah untuk rakyat Sukamakmur.

c. Idoanta br Purba. Usia 44 Tahun.

Idoanta merupakan mantan karyawan di Komplek Taman Jubelium milik GBKP. Namun karena melihat peluang di Sukamakmur, memutuskan tetap tinggal di desa ini meski ia dan suaminya bukanlah penduduk asli Sukamakmur. Idoanta membuka warung makan dan telah memiliki rumah hak miliknya di kawasan Dusun 3, yang menjadi kawasan pemukiman khusus pendatang.

3. Informan dari Pendatang dan sebagai Karyawan di Perusahaan

a. Lesmawati br Perangin-angin. Usia 55 Tahun.

Berasal dari Desa Lau Baleng, Kabupaten Karo, Lesmawati merupakan karyawan senior di Yayasan Ate Keleng (YAK). Bermukim di Sukamakmur sudah lebih dari 30 tahun. Lesmawati, yang hingga kini memilih untuk tidak menikah, telah memiliki rumah pribadi dan bekerjasama dengan penduduk lokal beternak ayam dan bebek dengan sistem bagi hasil.

b. Pdt. Yusuf Tarigan Sibero. Usia 41 Tahun.

Bekerja sebagai direktur di YAK dan sudah tinggal di Sukamakmur selama lebih dari 10 tahun. Tentang Sukamakmur tidaklah begitu asing bagi beliau karena pendeta ini telah menikah dengan penduduk desa tetangga lebih dari 15 tahun.

c. Pdt. Bumaman Teodeki Tarigan Sibero. Usia 48 Tahun.

Meskipun saat ini Pdt. Eki –begitu ia biasa dipanggil- telah memasuki masa-masa akhir jabatannya sebagai direktur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pijer Podi, dan dalam tiga tahun terakhir memilih menetap di Kota Medan, namun tentang Desa Sukamakmur tidaklah asing bagi beliau. Sebagai anak dari direktur sekaligus pendiri PARPEM GBKP, yang kini beralih nama menjadi YAK GBKP, Pdt. Eki sejak masa kanak-kanak telah terbiasa bermukim di desa ini.

4. Informan dari Pendatang Namun Tidak Memiliki Kaitan dengan Perusahaan

a. Jantoni Barus. Usia 58 Tahun.

Pemilik Panglong atau toko bangunan “BARUSTA”, sebagai toko bangunan paling besar di kecamatan Sibolangit. Sebagai pendatang sekaligus pemilik usaha yang berkembang pesat di Sukamakmur, Jantoni tetap merasa bahwa Sukamakmur bukanlah kampung halamannya meski mengakui bahwa Sukamakmur merupakan hal yang tidak terpisahkan dari hidupnya. Jantoni Barus memiliki rekam jejak yang baik di desa ini dan dipandang sebagai orang yang suka membantu.

b. Pdt. Magdalena Boru Simanjuntak. Usia 51 Tahun.

Pendeta ini sudah menetap di Sukamakmur lebih dari 10 tahun dan memiliki lebih dari 150 KK sebagai anggota jemaatnya. Sebagian kecil anggota jemaat pendeta ini adalah pendatang dari etnis Nias. Pendeta dari Gereja Pentakos di Indonesia (GPDI) ini bermukim di Sukamakmur bersama keluarganya dan telah memiliki lahan pertanian di Desa Durin Serugun.

5. Informan Tambahan

- 1) Bedi Gurusinga. Usia 57 Tahun. Bermukim di Kota Palangkaraya setelah menjual seluruh tanah warisan dari orangtuanya. Bedi Gurusinga saat ini memilih mengadu nasib di perantauan bersama keluarga besarnya, setelah tidak lagi memiliki lahan sebagai tempatnya bertani. Kemudian memilih Kota Palangkaraya karena memiliki daya saing yang masih rendah.
- 2) Misna br Ginting. Usia 58 Tahun.
- 3) Lela br Sembiring. Usia 37 Tahun.
- 4) Pdt. Insan Sinurat. Usia 29 Tahun.
- 5) Ajek Ginting. Usia 48 Tahun.
- 6) Sukirman Ginting Jawak.

Strategi Adaptasi Komunitas Petani Dari Ekonomi Pertanian ke Ekonomi Usaha Wisata

Walaupun pada tataran konsep, pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia sering dinyatakan sebagai pembangunan yang berorientasi ke daerah. Namun harus diakui bahwa pada tataran operasional efektivitas pelaksanaan program-program sangat diragukan hasilnya. Dalam banyak kasus, pembangunan daerah lebih banyak ditentukan oleh pemerintah pusat dengan sistem "*top-down planning*" dan bukan "*bottom-up planning*". Kelemahan sistem ini terletak pada ketidakmampuannya untuk menyerap aspirasi masyarakat daerah, dan pada gilirannya menyebabkan kurangnya partisipasi dan dukungan masyarakat (Sugihardjo et al., 2012). Disamping itu, di tingkat pelaksanaan banyak kasus juga menunjukkan bahwa sistem manajemen pelaksanaan program juga sulit dilaksanakan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Hal ini telah menyebabkan pelaksanaan program-program pembangunan lebih berorientasi formal (asal memenuhi target).

Belakangan disadari bahwa model pembangunan daerah seharusnya menyesuaikan diri dengan karakteristik sosial budaya setempat. Dengan model yang disesuaikan dengan karakteristik lokal ini diharapkan program-program pembangunan akan lebih lancar pelaksanaannya karena mendapat dukungan dari masyarakat. Lebih dari itu, diharapkan pula bahwa program pembangunan akan melembaga (*institutionalized*) dalam kehidupan masyarakat. Dalam arti kata lain, masyarakat menjadi penikmat utama dari terjadinya pembangunan ekonomi. Namun harus disadari bahwa untuk mencapai situasi tersebut perlu dikenali secara lebih mendalam karakteristik lokal masing-masing daerah di Indonesia. Salah satu pengenalan utama yang diperlukan adalah menyangkut karakteristik sosial budaya yang berkembang pada masyarakat lokal.

Pariwisata merupakan salah satu fenomena sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi, sehingga keadaan ini menjadi perhatian besar dari para ahli dan perencana pembangunan. Pembangunan sektor kepariwisataan diharapkan akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sejalan dengan itu memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat setempat. Masyarakat Sukamamur haruslah menjadi orang pertama yang mendapat nikmat perkembangan pesat di desa mereka.

Pembangunan kepariwisataan daerah merupakan bagian integrasi dari pembangunan daerah secara keseluruhan mengingat berwisata sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Ditambah dengan Sumatera Utara yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang

memiliki potensi pariwisata yang besar, maka Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak sekali daya tarik wisata alam (*nature*), budaya (*culture*), kerajinan, kuliner, dan rekreasi. Selain itu, dilihat dari tujuan kedatangan wisatawan, Sumatera Utara sangat potensial untuk menjadi daya tarik wisata religi, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Sebagai suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW), potensi kepariwisataan di daerah Sumatera Utara memiliki daya Tarik wisata yang cukup kuat bagi kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.

Pemahaman mengenai kehadiran wisatawan yang datang ke Provinsi Sumatera Utara haruslah tepat didekati, agar upaya pembangunan kepariwisataan di daerah ini mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Faktor pendukung kepariwisataan Provinsi Sumatera Utara yang sudah dimiliki berupa potensi kekayaan alam, budaya, kondisi sosial politik dan keamanan yang stabil, fasilitas dan sarana prasarana transportasi, kesehatan yang ada, sikap dan keterbukaan masyarakat, potensi dan kinerja sumber daya manusia, kebijakan pemerintah yang adaptif, sumber informasi dan promosi yang intens, kemudahan yang diberikan dalam urusan administrasi dan keimigrasian, serta kondisi perekonomian yang membaik secara global merupakan variabel penentu yang harus diperhatikan secara serius oleh semua pihak terutama pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Selaras dengan itu, maka pelibatan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting yang dapat dilakukan secara integratif diantaranya pengenalan budaya wisata sejak dini pada siswa sekolah, pembuatan paket wisata edukasi, kemudahan aksesibilitas melalui adanya tata sistem dan moda transportasi, dan penciptaan kegiatan-kegiatan pendukung seperti event kegiatan wisata tahunan berkelanjutan, ajang perlombaan, tahun kunjungan wisata, dan sebagainya.

Muhamad, (2015) mengatakan kesiapan merupakan sikap untuk berinteraksi terhadap sesuatu obyek dengan cara-cara tertentu atau kecenderungan potensial untuk berinteraksi apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki respon. Kesiapan memiliki peranan yang sangat penting dalam memulai suatu kegiatan, karena dengan adanya kesiapan maka akan mendapatkan hasil yang lebih baik, begitu pula dengan kegiatan pariwisata. Dengan memiliki kesiapan, masyarakat telah siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi untuk menunjang keberhasilan pariwisata. Jadi dengan demikian suatu kesiapan merupakan suatu pondasi dasar bagi suatu masyarakat atau pemerintah dalam menindaklanjuti terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan kedepannya. Dalam kegiatan pengelolaan pariwisata, tidak hanya peran pemerintah yang harus ikut ambil bagian, melainkan peran dari masyarakat sangat penting dalam pengelolaan dan pengembangan daerah wisata tersebut. Kesiapan masyarakat dari berbagai aspek memiliki peran penting dalam kepariwisataan, karena di dalam kegiatan pariwisata yang menjadi tolak ukur wisatawan yang datang berkunjung adalah masyarakat dari daerah objek wisata tersebut.

Partisipasi memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat. Dalam hal ini warga masyarakat diharapkan terlibat dalam urusan publik dan memberikan kontribusi terhadap isu-isu dalam urusan public (Raco, 2000). Artinya partisipasi masyarakat bukan hanya proses atau cara untuk mencapai tujuan, akan tetapi partisipasi dilihat sebagai kekuatan besar untuk transformasi relasi

sosial, ekonomi dan politik untuk pengentasan kemiskinan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi dari sektor kepariwisataan. Menurut Lestari, (2013) dalam hal ini komunitas sosial diharapkan sebagai agen perubahan yang mempercepat transformasi sosial yaitu merubah tata nilai lama supaya masyarakat marjinal pada umumnya tidak terus berada pada kubangan nilai-nilai agraris-foedal, yang selalu tidak menguntungkan pada posisi mereka sebagai sub-ordinat dalam menentukan kepentingan bersama di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Artinya masyarakat lokal akan mengalami pencerahan untuk gilirannya sadar akan hak-hak dan berani menyuarakan sendiri kepentingan mereka dalam posisi kesederajatan seperti warga bangsa lainnya. Selanjutnya kegiatan ini mendorong kesadaran kritis warga masyarakat agar mau berpartisipasi dalam program pembangunan daerah yang memerlukan *back-up* berupa regulasi yang jelas-jelas berpihak pada kepentingan seluruh rakyat.

Dalam mempengaruhi masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah dapat menggunakan metoda dan cara-cara komunikasi publik atau komunikasi khalayak dalam strategi yang dipilih untuk mensosialisasikan berbagai program pembangunan yang dipandang memerlukan keterlibatan publik dalam hal ini masyarakat sebagai pihak terkait yang dapat menentukan tercapainya sasaran yang telah digariskan pemerintah sebagai tujuan pembangunan. Dalam hal ini pemerintah dapat memperlakukan pendekatan partisipatif untuk kesuksesan sasarannya, manakala ia berisikan konsep "*agenda*" dan "*entitlement*", misalnya untuk memasarkan barang atau jasa tertentu dalam pariwisata sehingga arah "*marketplace issues*" yang seharusnya bergantung pada persepsi publik direfleksikanlah dalam kedudukan yang lebih bermakna agenda publik melalui advokasi yang dilakukan kelompok pendukung terhadap "*entitlement*" pandangan kelompok penentang.

Dalam menghabiskan waktunya di daerah tujuan wisata, maka wisatawan pasti berinteraksi dengan masyarakat lokal, bukan saja dengan mereka yang langsung melayani berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan (hotel, pemandu wisata, restoran, fasilitas hiburan, dan lainnya) , namun akan berinteraksi pula dengan masyarakat secara luas. Interaksi antara wisatawan dengan masyarakat akan semakin intensif manakala jenis atraksi wisata yang menjadi pusat perhatian adalah pariwisata budaya, dimana sifat interaksi dengan masyarakat lokal bersifat *transitory*, *non-repetitive*, dan *asymmetrical* (Pitana & Gayatri, 2005).

Dampak sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat (lokal) secara langsung dan tidak langsung dapat menjadi basis utama tingkat partisipasinya dalam mengembangkan usaha wisata. Menurut Aryunda, (2011) terdapat 8 bentuk kontribusi pariwisata terhadap ekonomi masyarakat, yaitu: (1). Penerimaan devisa, (2). Pendapatan masyarakat, (3). Kesempatan kerja, (4). Harga-harga barang di pasar, (5). Distribusi manfaat dan keuntungan, (6). Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol, (7). Dampak pada infrastruktur pembangunan, dan (8). Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Masyarakat lokal, terutama penduduk asli yang bermukim di kawasan wisata menjadi salah satu pemain kunci dalam konteks kegiatan pariwisata yang berlangsung. Masyarakat lokal merupakan pemilik langsung "atraksi wisata" (kebudayaan dan ekowisata) yang dikunjungi dan dikonsumsi oleh wisatawan. Oleh sebab itu, peran masyarakat lokal terutama dalam penyediaan akomodasi, jasa pemandu, dan fasilitas wisata lainnya serta kelembagaan sosial budayanya menyebabkan faktor determinan yang memerlukan perhatian pemerintah dan

stakeholder pariwisata lainnya untuk dikembangkan dalam ikhtiar mitra dan kemandirian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapatlah disimpulkan bahwa perkembangan kepariwisataan memerlukan lahan untuk penyediaan berbagai fasilitas dan pendukungnya. Desa Sukamakmur yang merupakan daerah strategis yang didukung oleh keadaan sumber daya alam dan iklim yang cocok sebagai daerah penyangga tujuan wisata –atau bahkan destinasi wisata itu sendiri, hingga akhirnya meningkatkan tingginya minat banyak perusahaan dan pengembang terhadap sumber daya alam Sukamakmur. Masyarakat Desa Sukamakmur yang pada awalnya bermata pencaharian sebagai petani yang memiliki lahan pertanian, saat ini telah banyak menjual lahannya karena harga tanah yang tinggi sehingga kemudian berdampak pada peralihan peruntukan lahan tersebut. Dampak perubahan peralihan lahan pertanian dan perkembangan Desa Sukamakmur sebagai daerah penyangga kepawisataan, maka sebagian besar komunitas petani yang telah menjual lahan pertaniannya melakukan adaptasi mata pencaharian dari ekonomi pertanian menjadi ekonomi pendukung usaha wisata diantaranya berdagang makanan dan minuman. Selain itu mata pencaharian non-pertanian diantaranya karyawan perusahaan usaha wisata, pertukangan, kerajinan serta jasa/agen jual beli tanah. Keberadaan perusahaan ini kemudian mengundang banyak pendatang untuk bermukim dan menetap di Sukamakmur. Sehingga kepadatan penduduk dan heterogenitas naik berkali-kali lipat dalam 15 tahun terakhir. Para pendatang ini pun pada akhirnya mengambil alih sebagian lahan pertanian untuk kemudian dijadikan pemukiman.

Perubahan sosial budaya yang berlangsung pada masyarakat Desa Sukamakmur diantaranya pergeseran makna tanah dalam kehidupan. Tanah sebagai simbol harga diri tidak lagi dianggap sesakral itu, melihat tingginya peminat dan juga akibat tuntutan kebutuhan hidup. Orientasi sistem mata pencaharian serta gaya hidup yang komersil, sistem gotong royong dari kolektifitas menjadi sistem upah dan tata cara adat yang kini lebih disederhanakan untuk efisiensi waktu dan mengurangi pemborosan. Tidak seluruh lapisan masyarakat menerima dampak positif pembangunan yang sedemikian pesat. Sebagian besar masyarakat mengalami struggle dalam mengikuti perubahan sosial yang menjadi buah pembangunan. Munculnya kelas-kelas sosial secara tidak langsung, terlihat dari keberhasilan proses adaptasi maupun kegagalan proses adaptasi. Konflik yang tercipta di antara masyarakat lokal tidak terhindarkan, sama seperti konflik antar pendatang dan penduduk lokal, yang juga disertai dengan konflik antar sesama pengusaha. Namun nilai-nilai tradisional yang masih melekat pada masyarakat baik pendatang maupun lokal, membuat konflik tidak membesar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryunda, H. (2011). Dampak ekonomi pengembangan kawasan ekowisata Kepulauan Seribu. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 22(1), 1–16.
- Hatu, R. A. (2018). *Problematika Tanah: Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*. Absolute Media.
- Kusumadinata, A. A. (2015). *Pengantar Komunikasi Perubahan Sosial*. Deepublish.
- Lestari, I. P. (2013). Interaksi sosial komunitas Samin dengan masyarakat sekitar. *Komunitas*, 5(1).

- Martono, N. (2012). Sosiologi perubahan sosial: Perspektif klasik, modern, posmodern, dan poskolonial (sampel halaman). RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Muhamad, M. (2015). Tingkat Kesiapan Masyarakat Pengelolaan Lingkungan Dan Kepariwisataan Alam Pasca-Erupsi 2010. *Jurnal Kawistara*, 5(2).
- Pitana, Ig., & Gayatri, P. G. (2005). Sosiologi pariwisata.
- Raco, M. (2000). Assessing community participation in local economic development—lessons for the new urban policy. *Political Geography*, 19(5), 573–599.
- Rawal, N. (2008). Social inclusion and exclusion: A review. *Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology*, 2, 161–180.
- Riyanto, A. (2019). Berteologi Baru untuk Indonesia. PT Kanisius.
- Rukajat, A., Ghony, M. D., & Almansur, F. (2021). 3.1 Desain Penelitian. *GAYA Komunikasi Selebgram Anggarita Dalam Product Endorsement*, 35.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). Metode penelitian kualitatif. UNISMA PRESS.
- Sugihardjo, S., Lestari, E. N. Y., & Wibowo, A. (2012). Strategi Bertahan dan Strategi Adaptasi Petani Samin terhadap Dunia Luar (Petani Samin di Kaki Pegunungan Kendeng di Sukolilo Kabupaten Pati). *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 8(2).
- Utama, I. G. B. R. (2017). Pemasaran pariwisata. Penerbit Andi.
- Utomo, A., & Sutopo, O. R. (2020). Pemuda, perkawinan, dan perubahan sosial di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 9(2), 77–87.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License